

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudiharjo, P., 2017, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bumi aksara, Jakarta.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bawengan, Gerson W. 2017, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chalmers, A.F., 1983, *What is the thing called science, Edisi Indonesia: Apa itu yang dinamakan ilmu?, Suatu Penilaian tentang watak dan Status Ilmu Serta Metodennya*. Hasta Mitra, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2012, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, *et.al.*, 2016, *Metode Peneltian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Farouk, Djaali Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial. Restu Agung*, Jakarta.
- Griffin, Ricky W., 2004, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Hadayaningrat, Soewarno, 1985, *Sistem Birokrasi Pemerintah*, Mas Agung, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Askara, Jakarta.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Jakarta*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metode Peneltian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Nasution, 2003, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Oneta, Erima, *et.al.*, 2009, *Anti Gaptek Internet*, Kawan Pustaka, Jakarta.

- Polri, Bareskrim, 2013, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta.
- Polri, Bareskrim, 2018, *Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Ruslan, Rosady, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sawir, Muhammad, 2020, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, deep publish.
- Siagian, Sondang P., 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, Richard M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Suharto, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 2018, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Bumi aksara, Jakarta.
- Tabah, Anton, 2002, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Tabah, Anton, 1993, *Patroli Polisi*, Gramedia, Jakarta.
- Terry, George, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zahnd, Markus, 2006, *Perancangan Kota Secara Terpadu*.

B. Jurnal

- Aristo, G. Sectio, “Implementasi E-MP Guna Mendukung Program Promoter di Wilayah Hukum Polres Sumedang”, *Advances in Police Science Research Journal*, 4(4).
- Bawono, Bambang Tri, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Agustus, 2011.
- Lasmadi, Sahuri, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 3, Juli, 2010.

C. Makalah/Tesis/Disertasi/Skripsi

- Miarmi, Ni Luh Putu, “Pengaturan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kawasan Jalur Hijau”, Tesis, Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2013.

D. Artikel dalam Antologi dengan Editor

Indroharto, 2013, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dalam Paulus Efendie Lotulung, 2013, *Himpunan Putusan-putusan di Bidang Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2013.

E. Internet

Detikcom, “Polda Sultra Janji Terbuka Tangani Kasus Penghinaan Suku Tolaki”, <https://news.detik.com/berita/d-5178357/polda-sultra-janji-terbuka-tangani-kasus-penghinaan-suku-tolaki/>, diakses 12 September 2020.

KBBI, <https://kbbi.web.id>, diakses pada hari 7 Februari 2021.

Medcom.com, “Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Dinilai Cukup Tinggi”, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/MkMGLGwN-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-dinilai-cukup-tinggi>, diakses 10 Juli 2020.

Rachmawati, “Perjalanan Kasus Tagih Utang "Ibu Kombes", Febi Dibebaskan karena Terbukti Meminjamkan Uang Rp 70 Juta”, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/10310021/perjalanan-kasus-tagih-utang-ibu-kombes-febi-dibebaskan-karena-terbukti?page=all>, pada 8 Oktober 2020.

Redaksi, “Pemanfaatan e-MP Menjadi Standar Penyidikan Tindak Pidana”. Reserse.id, <https://reserse.id/majalah/pemanfaatan-emp-menjadi-standar-penyidikan-tindak-pidana>, diakses 25 Mei 2020.

F. Peraturan dan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2014 Tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2010.
Tentang. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP
58/2010).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.